DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN SDR. AMUNUDIN A.R, S.H., M.H. BESERTA MASYARAKAT PENGADU

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	XXXIX
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sdr. Aminudin A.R., S.H.M.H. berserta Masyarakat Pengadu
Acara Rapat	:	Mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum
Hari / tanggal	:	Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu	:	Pukul 13.00 s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Bimantoro Wiyono, S.H./Anggota Komisi III DPR RI
Sekretaris	:	Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	:	1. 2 (Dua)Orang Pimpinan dari 5 (Lima) orang Pimpinan 2. 4 (Empat) orang Anggota dari 46 (Empat Puluh Enam) Anggota dan 5 (Lima) Fraksi dari 8 (Delapan) Fraksi 3. Sdr. Aminudin A.R., S.H., M.H.beserta masyarakat pengadu

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdr. Aminudin H.R., S.H., M.H., M.H.dinyatakan terbuka dan dibuka untuk Umum pada pukul 13.00 Wib oleh Bimantoro Wiyono, S.H Anggota Komisi III DPR RI

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Komang Ani Susana, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
   1. Riwayat 13 Bidang Tanah yang diserobot oleh PT. Paramount
   2. Kronologi Tanah Diserobot
   3. Upaya hukum terhadap 3 (tiga) Hak Guna Bangunan PT. Paramount
   4. Penerbitan HGB Nomor 5080, HGB 5081, & HGB No. 10427 dengan Melanggar Hukum (Melanggar Pasal 263 KUHP & pasal 266 KUHP)
   5. Gugatan perdata sudah dilakukan terhadap perkara no. 713/pdt/2021/PN.TNG dan Perkara no. 306/Pdt.G/2022/PN.Tng
   6. Dugaan keterlibatan “Mafia Peradilan”
   7. Laporan Polisi no. LP/137/II/2017/Bareskrim Tanggal 8 Februari 2017

B. Prof. Dr. Ahmad Qurtubi, M.A, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
   1. Kronologi perkara Nomor : LP/5752/X/2018/PMJ/Dit Reskrimum pada tanggal 23 oktober 2018 pasal 362 jo 372 KUHP
   2. Kronologi perkara Nomor : LP/5962/X/2018/PMJDitreskrimum, Tanggal 29 Oktober 2018 pasal 330 KUHP (membawa anak dari kuasa yang sah)
   3. Kronologi perkara Nomor : LP Nomor :STTPL/B/6558/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 1 November 2023 tentang AJB Pura-pura (Sama sekali belum di BAP)
   4. Memohon tindak lanjut permohonan perlindungan Hukum bagi Ahmad Qurtubi dan Ketiga anak-anaknya agar dapat terliondungi dari ancaman dan kejahatan tindak pidana, serta untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

C. Veronika L Giron, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
   1. Kronologi Perolehan Hak
   2. Kronologi Penyerobotan Tanah tanpa Ijin
   3. Upaya Hukum yang telah ditempuh (Pengaduan ke Polres Jembrana dan Laporan Polisi ke Polda Bali)
   4. Proses Tumpang tindih hak atas tanah
   5. Upaya Hukum Lain yang telah ditempuh (Laporan ke Polri dan Presiden)

D. Pendalaman Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI
   1. Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi ke Komisi III DPR RI.
   2. Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memanggil pihak-pihak terkait

III. KESIMPULAN

==========TIDAK ADA KESIMPULAN==========

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.57 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
ANGGOTA ,

TTD

BIMANTORO WIYONO, S.H.
A-128